



Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dalam Mengelola Desa Wisata Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang

Nurhafizha Khairi¹, Liyushiana¹, Devy Meylani Rajagukguk^{1*}, Enjeli Mitami Batubara¹, Tiara Ananda Farrah¹

¹Program Studi Destinasi Pariwisata, Politeknik Pariwisata Medan, Indonesia

*Corresponding author email: devymeylani267@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 18, 2024

Approved December 26, 2024

Keywords:

Collaboration, government, ecotourism, community

ABSTRACT

Collaboration between government and community in managing natural resources is increasingly relevant in the modern era, especially in the context of ecotourism development. Tanjung Rejo Tourism Village, with its great Mangrove ecotourism potential, is an interesting example to be studied further. The existence of extensive Mangrove forests and supported by local wisdom in its management offers great opportunities for the development of nature-based tourism. This study aims to analyze existing Mangrove ecotourism management policies, identify weaknesses, and evaluate their implementation in the field. In addition, this study also aims to formulate a collaboration strategy between the government, community, and stakeholders, so that Mangrove ecotourism management can run more optimally and sustainably. The location of the study was in Tanjung Rejo Tourism Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. This study uses a descriptive qualitative approach. This approach was chosen because the study aims to understand in depth the form of collaboration between the government and community in managing Mangrove ecotourism in Tanjung Rejo Tourism Village, as well as how this collaboration is organized through the DMO theory. The study also shows that this collaboration has a significant impact. In addition to increasing environmental awareness, ecological management also provides benefits to local communities through job creation and increased income from the tourism sector. The role of the community is also important for Mangrove conservation and tourism sustainability in Tanjung Rejo Tourism Village. With that, the community gets economic benefits from tourism activities, such as providing tour guide services, selling local products. Based on the implementation of the Field Project Study (FPS) of the Medan Tourism Polytechnic which has conducted collaborative research between the Government and the community carried out in Tanjung Rejo Tourism Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency in managing Mangrove ecotourism has shown positive results. The community is actively involved in managing and preserving the environment, while the government provides the necessary support. However, existing challenges need to be addressed so that ecotourism management can be sustainable and beneficial for all parties.

ABSTRAK

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam semakin relevan di era modern, terutama dalam konteks pengembangan ekowisata. Desa Wisata Tanjung Rejo, dengan potensi ekowisata Mangrove yang besar, merupakan salah satu contoh yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Keberadaan hutan Mangrove yang luas dan didukung oleh kearifan lokal dalam pengelolaannya menawarkan peluang besar untuk pengembangan wisata berbasis alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan ekowisata Mangrove yang ada, mengidentifikasi kelemahan, serta mengevaluasi implementasinya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, agar pengelolaan ekowisata Mangrove dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wisata Tanjung Rejo, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata Mangrove di Desa Wisata Tanjung Rejo, serta bagaimana kolaborasi tersebut diorganisasi melalui teori DMO. Penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi ini memberikan dampak yang signifikan. Selain meningkatkan kesadaran lingkungan, pengelolaan ekologi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Peran masyarakat juga penting demi pelestarian Mangrove dan keberlanjutan pariwisata di Desa wisata Tanjung Rejo. Dengan itu masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata, seperti penyedia jasa pemandu wisata, penjualan produk lokal. Berdasarkan pelaksanaan Field Project Study (FPS) Politeknik Pariwisata Medan yang telah melakukan Penelitian kolaborasi antar Pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Wisata Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dalam mengelola ecotourism Mangrove telah menunjukkan hasil positif. Masyarakat aktif terlibat dalam mengelola dan pelestarian lingkungan, sementara pemerintah memberikan dukungan yang diperlukan. Namun, tantangan yang ada perlu ditangani agar pengelolaan ecotourism dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Khairi, N., Liyushiana, Rajagukguk, D. M., Batubara, E. M., & Farrah, T. A. (2024) Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dalam Mengelola Desa Wisata Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2735-2744. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3580>

PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang menghitung dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan melestarikan potensi pembangunan desa adalah melalui kegiatan pengembangan pariwisata lokal atau kegiatan melalui desa wisata.

Desa Tanjung Rejo yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, adalah salah satu desa yang letaknya berada di wilayah pesisir pantai timur Sumatera dengan luas 4.114 Hektare. Desa Tanjung Rejo terdiri dari 14 Dusun dengan bentang alam terluasnya 704 Ha. Desa wisata Tanjung Rejo adalah satu-satunya desa wisata

Mangrove yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tanjung Rejo memiliki hamparan hutan Mangrove yang masih asri seluas 602.181 Ha.

Menurut Priasukmana Mulyadin (2001), desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa wisata. Di Kabupaten Deli Serdang, Desa Tanjung Rejo menjadi salah satu contoh konkret yang berhasil memanfaatkan potensi alam dan budaya untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Desa ini memiliki hutan Mangrove yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai daya tarik wisata berbasis lingkungan. Wisata Mangrove di Desa Tanjung Rejo menawarkan nilai edukasi bagi pengunjung sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Collaborative Governance has developed related to “multi-layered system context” including policy and legal frameworks, resource conditions, network characteristics, and power relation (Ariesmansyah, 2022).

Peran pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan promotor. Pemerintah bertugas membangun dan memperbaiki jalan, sanitasi, listrik, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program-program pengembangan desa wisata. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata.

Lembaga masyarakat juga memiliki peran tidak kalah pentingnya dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata. Lembaga masyarakat dapat memobilisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Lembaga masyarakat berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan di desa wisata. Lembaga masyarakat dapat memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak nilai-nilai tradisional dan ekosistem setempat.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam keberlanjutan destinasi wisata karena masyarakat lokal adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan wisatawan dan mengelola berbagai aspek pariwisata. Butler (1999) dalam teori *Life Cycle of Tourism Destination* mengemukakan bahwa keberlanjutan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaannya seperti homestay, restoran, dan toko suvenir. Ketika masyarakat terlibat secara langsung, mereka memiliki kepentingan besar dalam menjaga kualitas layanan dan produk yang mereka tawarkan kepada wisatawan. Hal ini karena kualitas tersebut berdampak langsung pada kepuasan pengunjung dan pada akhirnya, menentukan kesuksesan usaha mereka. Oleh karena itu, komunitas yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan desa wisata akan berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar serta daya tarik destinasi wisata agar tetap menarik perhatian para pengunjung. Ini juga memastikan bahwa desa wisata bisa tumbuh dengan lestari, baik secara ekonomi maupun dalam menjaga budaya dan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat secara aktif sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan desa wisata. Namun Collaborative Governance yang ada terkendala oleh pemahaman akan sadar wisata yang masih kurang oleh masyarakat, kurangnya sarana prasarana

untuk mengembangkan desa wisata, terdapat kurangnya kepercayaan antar pihak-pihak yang bekerja sama serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia maka dibutuhkan peran aktif dari masing-masing stakeholder untuk mengembangkan desa wisata.

Selain itu, inovasi masyarakat lokal dalam mengelola rumah batik dengan bahan dasar getah Mangrove menunjukkan bagaimana kekayaan alam bisa diolah menjadi produk budaya bernilai tinggi. Pemberdayaan ini tidak hanya memberikan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga menjaga warisan budaya lokal. Desa ini juga memiliki taman edukasi yang didedikasikan untuk pembelajaran mengenai ekosistem Mangrove, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Rumah tenun ulos, yang dikelola langsung oleh masyarakat Desa Tanjung Rejo, menambah kekayaan budaya dan kearifan lokal yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan desa wisata ini menjadi kunci keberhasilan pengembangan potensi lokal untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Dengan berbagai potensi tersebut, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memaksimalkan pengelolaan potensi Desa Wisata Tanjung Rejo sehingga mampu berkontribusi lebih luas terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan.

Namun pemerintah dan masyarakat kurang bekerja sama dalam pengembangan desa wisata di Tanjung Rejo mengalami beberapa tantangan yang signifikan. Dalam merancang program pengembangan, pemerintah sering kali tidak melibatkan masyarakat lokal, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan karakteristik unik desa. walaupun kedua belah pihak berkomitmen untuk meningkatkan potensi pariwisata, pelaksanaan program pengembangan terkendala oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Pemerintah kerap mengambil keputusan tanpa mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaannya, sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara kebijakan yang diajukan dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Sementara itu, masyarakat merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, sehingga menurunkan rasa memiliki dan dukungan terhadap program-program yang ada seperti pemerintah menetapkan zona larangan tertentu, seperti larangan aktivitas di area konservasi, tanpa menjelaskan alasannya kepada masyarakat. Hal ini bisa berdampak pada hilangnya akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka. Dampaknya, banyak upaya untuk mengembangkan desa wisata yang tidak berlangsung sesuai rencana, bahkan beberapa proyek mengalami keterlambatan atau kurang memperhatikan aspek keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

METHOD PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bentuk kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan ekowisata Mangrove di Desa Wisata Tanjung Rejo, serta bagaimana kolaborasi tersebut diorganisasi melalui teori DMO. Menurut Burhan Bungin (2017), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara komprehensif dengan memahami perspektif subjek penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada proses kolaborasi dan pola interaksi yang muncul antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan ekowisata Mangrove. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik

yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi serta studi pustaka. Data dianalisis menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori DMO digunakan untuk melihat bagaimana kolaborasi ini terorganisasi dan dikelola secara strategis. DMO bertindak sebagai kerangka kerja untuk memahami peran koordinasi antara berbagai pihak dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi ekowisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul “ kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dalam mengelola Ecotourism Mangrove di Desa Wisata Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang” mengkaji bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah dengan Lembaga Masyarakat dalam mengelola ecotourism Mangrove di Desa Tanjung Rejo. Bentuk kolaborasi pemerintah dan lembaga masyarakat yaitu pemerintah desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa ini dikenal sebagai destinasi Ekowisata yang berfokus pada perlindungan lingkungan Mangrove dan memberikan dampak ekonomi bagi Masyarakat setempat.

Desa Tanjung Rejo yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, adalah salah satu desa yang letaknya berada di wilayah pesisir pantai timur Sumatera dengan luas 4.114 Hektare. Desa Tanjung Rejo terdiri dari 14 Dusun dengan bentang alam terluasnya 704 Ha. Desa wisata Tanjung Rejo adalah satu-satunya desa wisata Mangrove yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tanjung Rejo memiliki hamparan hutan Mangrove yang masih asri seluas 602.181 Ha.

Penelitian ini berawal dari permasalahan ekowisata yang tidak hanya memerlukan pelestarian lingkungan, tetapi juga harus memberdayakan masyarakat lokal dan melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kolaborasi ini penting karena keberhasilan pengelolaan ekowisata tidak hanya bergantung pada peran satu pihak saja. Keberhasilan pengelolaan ekowisata juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak terkait dalam mendorong pariwisata keberlanjutan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti bahwa ekowisata Mangrove di Desa Wisata Tanjung Rejo dikelola dengan model kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan memberikan dukungan infrastruktur, sementara masyarakat lokal terlibat langsung dalam operasional sehari-hari, seperti pemandu wisata, penyedia jasa kuliner, dan usaha cinderamata.

Penelitian juga menekankan pentingnya peran pokdarwis dalam menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kelompok ini berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan ekowisata. Selain itu, LSM berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola ekowisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, meskipun ada banyak tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran yang ada, kurangnya promosi dan terbatasnya partisipasi masyarakat pada awal pengelolaan. Namun dengan adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas, masyarakat mulai menyadari pentingnya

peran mereka dalam menjaga lingkungan dan mendukung pengembangan ecotourism di daerah mereka.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi ini memberikan dampak yang signifikan. Selain meningkatkan kesadaran lingkungan pengelola ekologi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Keberlanjutan proyek ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan aktivitas ekonomi.

Selanjutnya dalam teorinya Anshel dan Gash (2007) menjelaskan bahwa Collaborative Governance memuat 4 dimensi yaitu pertama, dimensi tata kelola kolaboratif kondisi awal, kedua dimensi tata kelola kolaboratif kelembagaan, ketiga dimensi tata kelola kolaboratif kepemimpinan, dan keempat ada proses kolaboratif yang memuat 3 sub dimensi adalah (masalah peraturan, arah peraturan, pelaksanaan). Penelitian ini akan menganalisis proses dari kolaborasi pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mengelola ecotourism Mangrove Desa wisata Tanjung Rejo menurut Ansell And Gash (2008) meliputi indikator sebagai berikut:

a. Face to Face dialogue (Dialog Tatap Muka)

Proses interaksi tatap muka antar pemangku kepentingan merupakan bagian pertama dari proses tata kelola kolaboratif. Menurut Ansell dan Gash (2008), proses ini bertujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Dialog pribadi merupakan media komunikasi yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi dan memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dialog tatap muka merupakan proses penting yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan dan mediasi isu-isu terkait proses tata kelola kolaboratif.

Pembahasan mengenai Collaborative Governance dalam Pengembangan desa Wisata di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. dengan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash, keberhasilan Collaborative governance ditentukan oleh 5 variable yaitu: Face-to-Face Dialogue (dialog tatap muka), Trust Building (Membangun Kepercayaan), Commitment to the Process (Komitmen terhadap Proses), Shared Understanding (Pemahaman Bersama), Intermediate Outcomes (Outcome Menengah) Hasil penelitian ini melalui pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Interaksi personal dalam pengembangan Mangrove desa wisata tanjung Rejo dapat ditunjukkan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh para aktor sesuai tugas pokok dan perannya. Hal ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengelola konservasi Mangrove desa wisata tanjung Rejo mengenai isu-isu dalam pengelolaan konservasi, yaitu bagaimana menghadapi kondisi alam yang tidak dapat diprediksi dan limbah yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem Mangrove.

Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan perlindungan Mangrove desa wisata tanjung Rejo, bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisis praktik kerja sama konservasi dan pengembangan Mangrove di desa wisata tanjung Rejo masih dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini tercermin dari kurangnya implementasi yaitu terbentuknya forum komunikasi yang inklusif, dan dapat menimbulkan kolaborasi yang tidak efektif dan efisien. Forum Komunikasi berfungsi sebagai forum penggalangan aspirasi, penyusunan rencana strategis, pembahasan perkembangan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo dan evaluasi pelaksanaannya. Dengan kurangnya forum komunikasi menjadi

kendala bagi para stakeholder dan membuat koordinasi dan komunikasi tidak terjadi dengan partisipasi komprehensif dari pihak, atau forum hanya tersedia sebagian. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan kurang efektif dan efisiennya sinkronisasi kegiatan program. Selain itu, analisis praktik pengembangan masyarakat di Konservasi Mangrove desa wisata tanjung Rejo dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini tercermin dari kurangnya implementasi yaitu terbentuknya forum komunikasi yang inklusif, dan dapat menyebabkan kolaborasi menjadi kurang efektif dan efisien.

b. Trust Building (Membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan adalah merupakan proses penting ketika menerapkan kolaborasi. Proses tata kelola kolaboratif gagal mencapai tujuan yang ingin dicapai jika pemangku kepentingan yang terlibat tidak mampu membangun kepercayaan. DeServe (2007) menemukan bahwa kepercayaan di antara pemangku kepentingan adalah salah satu faktor kunci keberhasilan. Membangun kepercayaan antar aktor (trust building) dilakukan untuk meningkatkan kontrol terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan kolaborasi pemerintah.

Hasil spesifik penelitian menjelaskan bahwa proses kolaboratif dalam pengembangan, komunikasi dan koordinasi konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo hanya terlaksana ketika program dan kegiatan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo dilakukan. Selanjutnya pelaksanaan Forum Komunikasi dilakukan dalam satuan kelompok yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360 Tahun 2011 yaitu Pokja Mangrove.

Namun dalam prosesnya, keterbatasan sumber daya anggaran daerah menjadi penghambat proses tersebut, sehingga mengakibatkan hilangnya platform untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dalam proses masyarakat untuk mengembangkan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo.

c. Commitment to Process (Komitmen Terhadap Proses)

Proses Tata Kelola Kolaboratif merupakan Komitmen terhadap proses yang ada merupakan elemen kunci dalam tata kelola kolaboratif yang sukses. Deserve (2007) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan adalah komitmen terhadap tujuan bersama, dan setiap aktor mempunyai alasan dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam prosesnya. Di sisi lain, komitmen terhadap proses kolaboratif sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Namun hasil studi yang diidentifikasi menunjukkan bahwa beberapa anggota yang terlibat dalam konservasi dan pengelolaan hutan Mangrove desa wisata tanjung. Namun tujuan dari kolaborasi adalah untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Oleh karena itu, dalam hal ini keterlibatan pemangku kepentingan menjadi penting untuk melaksanakan visi dan misi serta mencapai tujuan bersama yaitu pengembangan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo dan isu-isu terkait. Harapan berjalannya proses collaborative governance adalah masing-masing stakeholders yang terlibat dalam pengembangan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo memiliki tujuan yang sama dan komitmen dalam pelaksanaannya.

d. Shared Understanding (Pemahaman Bersama)

Pemahaman bersama adalah proses menyelaraskan persepsi dan pemahaman untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa pemahaman bersama adalah pengembangan dari pemahaman bersama mengenai visi, misi,

tujuan, dan ideologi bersama. Implementasi kesepahaman bersama dalam pengembangan konservasi Mangrove sedang berlangsung, namun terdapat tantangan. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pemahaman bersama dalam pengembangan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo. Selain itu, para pelaku yang terlibat dalam pengembangan konservasi Mangrove memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu Mangrove yang berkelanjutan dan dilindungi. Di sisi lain, pemahaman bersama tidak dapat tercapai kecuali pihak-pihak yang terlibat bersedia berbagi persepsi (Aranda, dkk, 2007: -244). Dapat disimpulkan bahwa Common Understanding atau Pemahaman Bersama dalam Pelestarian dan Pengembangan Mangrove di desa wisata tanjung Rejo belum terbangun secara maksimal karena masih adanya pemahaman yang kurang dan sikap ego sektoral dalam pelaksanaannya.

e. Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Hasil yang dicapai setelah proses kolaboratif dilaksanakan dan hasil akhir tercapai. Hasil dari proses kolaborasi bersifat sementara dan bukan merupakan tujuan utama kolaborasi yang dilakukan berhasil, kita bisa membicarakan hasil sementara yang konkret. Sedangkan tujuan utama pengembangan ecotourism Mangrove di desa wisata tanjung Rejo adalah dengan mewujudkan ekosistem Mangrove yang lestari, terlindungi, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sejalan dengan tujuan konservasi.

Selanjutnya, hasil sementara tersebut akan dicapai dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan, yang berkontribusi terhadap pengembangan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo sesuai misi utama masing-masing. Menurut DeSeve (2007: 50), ada beberapa kriteria keberhasilan kolaborasi, termasuk akses terhadap sumber daya. Dalam pengembangan konservasi Mangrove, sumber daya Tirta meliputi sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan sumber daya lainnya.

Namun, salah satu kendala yang dihadapi kelompok konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo dalam implementasinya adalah keterbatasan anggaran. Hal ini jelas terlihat dari fakta bahwa kekurangan. Selain itu, pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian. Beberapa fasilitas seperti jembatan dan papan informasi terasa tua. Selain itu, fasilitas-fasilitas tersebut juga diperlukan dalam pengembangan Konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo guna mendukung pengelolaan dan mencapai ekosistem Mangrove yang lestari dan terlindungi sesuai dengan tujuan konservasi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan kolaborasi juga membutuhkan beberapa faktor pendukung seperti: pemerintah desa juga masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat, komunikasi yang jelas, terarah, dan tepat waktu menghindari miskomunikasi dan konflik, adanya riwayat kerja sama yang positif di antara pihak-pihak yang berkolaborasi, dan tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian yang relevan. Ada juga beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti: semua anggota tim terbuka terhadap ide-ide baru dan inovasi, serta peran masing-masing pihak harus jelas, misalnya pemerintah menyediakan infrastruktur, sedangkan masyarakat mengelola destinasi wisata.

Lembaga masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melibatkan dalam pengelolaan sumber daya lokal yang bisa menjadi daya tarik wisata, mengikut sertakan

masyarakat lokal sebagai pemandu wisata lokal, dan keterlibatan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Beberapa tantangan yang dihadapi juga kurangnya dukungan pemerintah yang dapat menghambat pengembangan desa wisata.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola ekowisata Mangrove di Desa Wisata Tanjung Rejo menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Model kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, pokdarwis, dan LSM telah berhasil menciptakan dampak positif, baik dalam hal pelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil yang dicapai setelah proses kolaboratif dilaksanakan dan hasil akhir tercapai. Hasil dari proses kolaborasi bersifat sementara dan bukan merupakan tujuan utama kolaborasi yang dilakukan berhasil, kita bisa membicarakan hasil sementara yang konkret. Sedangkan tujuan utama pengembangan ecotourism Mangrove di desa wisata tanjung Rejo adalah dengan mewujudkan ekosistem Mangrove yang lestari, terlindungi, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sejalan dengan tujuan konservasi.

Selanjutnya, hasil sementara tersebut akan dicapai dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan, yang berkontribusi terhadap pengembangan konservasi Mangrove di desa wisata tanjung Rejo sesuai misi utama masing-masing. Menurut DeSeve (2007: 50), ada beberapa kriteria keberhasilan kolaborasi, termasuk akses terhadap sumber daya. Dalam pengembangan konservasi Mangrove, sumber daya Tirta meliputi sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan sumber daya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., & Salsabila, N. (2022). Pengembangan potensi wisata edukasi oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui konsep penta-helix di kawasan geowisata Kawah Wayang desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 9-21.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Ariesmansyah, A. (2022). Collaborative governance in enforcement program for restrictions on community activities in Bandung City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(2), 290-300
- Kurnia, L. K. (2015). *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Kemitraan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove WonoRejo Surabaya antara Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Pinandhika, M. F., & Harsono, D. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(1), 13.
- Putri, A. R. S. (2018). Koordinasi Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Strategi Pengembangan Destination Management Organization (DMO) di Pangandaran (Studi pada Disparperindagkop UMKM dan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)*, 19-33.

- Rohana, L. (2016). *Implementasi Destination Management Organization (DMO)(Studi Pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Periode 2010-2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Utomo, B., & Kel, S. *Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Mangrove*. Penerbit Adab.